

PENGUMUMAN

Nomor : 17/Tim-Rev/04/2018

Tentang

HASIL PENILAIAN TAHAP IPROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF KERJASAMA MK DENGAN FH PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2018

Tim Review Proposal Penelitian Kompetitif kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa Hasil Penilaian Tahap I Proposal Penelitian Kompetitif Kerjasama MK dengan FH Perguruan Tinggi se-Indonesia dibidang Hukum dan Konstitusi sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.

Terhadap Proposal Penelitian yang berada pada Peringkat I sampai dengan XVIII dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian tahap II, yang akan di selenggarakan pada:

- a. Hari & Tanggal : Jum'at, 11 Mei 2018
- b. Pukul : 08.00 WIB - selesai
- c. Tempat : *sebagaimana jadwal pada Lampiran II*

1. Penilaian tahap II dilakukan dengan cara presentasi Proposal Penelitian oleh masing-masing Tim Peneliti melalui *Video Conference* di Fakultas Hukum sebagaimana yang telah ditentukan pada **Lampiran II**.
2. Durasi presentasi masing-masing Tim Peneliti paling lama 25 menit yang meliputi pemaparan dan tanya jawab.
3. Semua Tim Peneliti yang mengikuti penilaian tahap II wajib menyampaikan bahan presentasi dalam bentuk power point yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal MKRI, c.q. Kapuslitka paling lambat Senin, 7 Mei 2018, melalui e-mail : puslitka_mk@yahoo.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan Keputusan Tim Review Proposal Penelitian Kompetitif bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 30 April 2018

An. Sekretaris Jenderal
Kepala Puslitka,



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

Lampiran I

Tentang : Hasil Penilaian Tahap I Proposal Penelitian Kompetitif Kerjasama MK dengan FH
Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap I

Nomor : 17 /Tim-Rev/04/2018

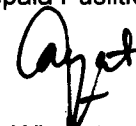
Tanggal : 30 April 2018

No.	Judul Proposal Penelitian	Peringkat
1	Korelasi Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik <i>Judicial Activism</i> Di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2017)	I
2	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	II
3	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan <i>Orang Lom Suku Mapur</i> Di Kepulauan Bangka Belitung	III
4	Legitimasi Praktik <i>Overruling</i> Di Mahkamah Konstitusi	IV
5	Reposisi dan Revitalisasi Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Membangun Integritas Hakim Konstitusi	V
6	Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia	VI
7	Metafora Hukum Sebagai Pendekatan Interpretasi Menuju Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Responsif Dan Futuristik	VII
8	Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	VIII
9	Urgensi Penerapan Konsep <i>Godly Constitution</i> Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi	IX
10	Penguatan Mahkamah Konstitusi Dalam Kedudukannya Sebagai Penjaga Konstitusi Dan Ideologi	X
11	Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas Hakim Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	XI
12	Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Positive Legislator</i> (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 Terkait Kelembagaan Petani)	XII
13	Problematis Dan Pembaruan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009	XIII
14	Sengketa kewenangan DPD-RI dengan DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi	XIV
15	Redesain Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi	XV

16	Kebiasaan Ketatanegaraan (<i>Costum</i>) Dan Kesepakatan Ketatanegaraan (<i>Agreement</i>) Sebagai Alat Uji Dalam Perkara <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	XVI
17	Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	XVII
18	Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah	XVIII
19	Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang-Undang Terhadap Politik Kriminal Indonesia	XIX
20	Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Harmonisasi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	XX
21	Relasi Hak Ekonomi-Sosial Dan Prinsip-Prinsip Haluan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Penegakannya Di Mahkamah Konstitusi	XXI
22	<i>Departmentalism</i> Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	XXII
23	Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai " <i>Positive Legislature</i> " Untuk meningkatkan Praktik <i>Transfer of Technology</i> Dalam Proses Investasi Di Indonesia	XXIII
24	Konsep Membangun Kesadaran Berkonstitusi Bagi Institusi Penegak Hukum Melalui Penaatan Terhadap Putusan MK Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan MK	XXIV
25	Kedudukan dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia	XXV
26	Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	XXVI
27	Harmonisasi Putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi Dengan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Tercapainya Kepastian Hukum	XXVII
28	Legitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi	XXVIII
29	Tindak Lanjut Nasib Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang <i>Impeachment</i> Presiden Pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	XXIX
30	Reformasi Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peradilan Yang Independen Berintegritas (Studi Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002-003/PUU-V/2007, Nomor 46/PUU-Xiv/2016 Dan Nomor 36/PUU-XV/2017)	XXX
31	Rekonstruksi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi dan Ideologi	XXXI
32	Penegakan Hukum Konstitusi Di Bawah Naungan Etika Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Keluhuran Martabat Hakim Serta Kehormatan Mahkamah Konstitusi	XXXII
33	Pembaharuan Hukum Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Demi Menjaga Kewibawaan Mahkamah Konstitusi	XXXIII

34	Kontestasi Sistem Ekonomi Pancasila Dan kepentingan Globalisasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	XXXIV
35	Membangun <i>Legal Basis</i> Terhadap Keterangan DPR Dan Presiden Dalam Uji Materil	XXXV
36	Pengawasan Mahkamah Konstitusi Melalui Lembaga Perguruan Tinggi	XXXVI
37	Hukum Internasional dalam Penguatan Materi Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi	XXXVII
38	Akibat Hukum Terhadap Putusan <i>Final and Binding</i> Mahkamah Konstitusi	XXXVIII
39	Afektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dalam rangka Tercapainya <i>Access To Justice</i> di Indonesia	XXXIX
40	Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia : Perlindungan Kebebasan Berkontrak Sebagai Hak Konstitusi	XL

Kepala Puslitka,



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

Lampiran II

Tentang : Hasil Penilaian Tahap I Proposal Penelitian Kompetitif Kerjasama MK dengan FH Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2018 Tahap I

Nomor : 17 /Tim-Rev/04/2018

Tanggal : 30 April 2018

JADWAL PENILAIAN TAHAP II

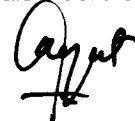
NO	Hari/Pukul	Judul Proposal Penelitian	Peringkat	Lokasi Presentasi
	Jum'at 11 Mei 2018			
1	Pukul 08.00 - 08.25	Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	VIII	Vicon Unhas
2	Pukul 08.25 - 08.50	Redesain Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi	XV	Vicon Univ. Lambung Mangkurat
3	Pukul 08.50 - 09.15	Problematik Dan Pembaruan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009	XIII	Vicon Univ. Jember
4	Pukul 09.15 - 09.40	Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah	XVIII	Vicon Unbraw
5	Pukul 09.40 - 10.05	Penguatan Mahkamah Konstitusi Dalam Kedudukannya Sebagai Penjaga Konstitusi Dan Ideologi	X	Vicon Unbraw
6	Pukul 10.05 - 10.30	Dimensi Asas Pemilihan Umum dan Integritas Hakim Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	XI	Vicon Unbraw
7	Pukul 10.30 - 10.55	Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 Terkait Kelembagaan Petan	XII	Vicon UNS
8	Pukul 10.55 - 11.20	Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi	IV	Vicon Undip
9	Pukul 13.30 - 13.55	Sengketa kewenangan DPD-RI dengan DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi	XIV	Vicon Undip
10	Pukul 13.55 - 14.20	Urgensi Penerapan Konsep <i>Godly Constitution</i> Dalam Pengujian Perkara Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi	IX	Vicon Univ. Pancasakti Tegal
11	Pukul 14.20 - 14.45	Reposisi dan Revitalisasi Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Membangun Integritas Hakim Konstitusi	V	Vicon UGM
12	Pukul 14.45 - 15.10	Korelasi Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik <i>Judicial Activism</i> Di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2017)	I	Vicon UGM
13	Pukul 15.10 - 15.35	Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	XVII	Vicon Univ. Sultan Ageng Tirtayasa
14	Pukul 15.35 - 16.00	Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i> Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	II	Vicon Unpad
15	Pukul 16.00 - 16.25	Metafora Hukum Sebagai Pendekatan Interpretasi Menuju Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Responsif Dan Futuristik	VII	Vicon Univ. Lampung

16	Pukul 16.25 - 16.50	Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia	VI	Vicon Univ. Jambi
17	Pukul 16.50 - 17.15	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan Orang Lom Suku Mapur Di Kepulauan Bangka Belitung	III	Vicon Univ. Babel
18	Pukul 17.15 - 17.40	Kebiasaan Ketatanegaraan (Costum) Dan Kesepakatan Ketatanegaraan (Agreement) Sebagai Alat Uji Dalam Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	XVI	Vicon Univ. Bengkulu

Catatan:

- Jadwal dapat berubah menyesuaikan kegiatan Mahkamah Konstitusi

Kepala Puslitka,



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.